2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LUWU TIMUR

LAKIP 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan fungsi dan pelayanan oleh instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah yang efisien dan efektif, hendaknya berdasar atas sejumlah dokumen perencanaan yang sinergis dan konsisten.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Program yaitu masih rendahnya kemampuan manajerial pengelola Program untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mampu meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk itu diperlukan kemampuan manajerial pengelola program melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dari atasan masing-masing program, dan kedepan kerjasama lintas program dan lintas sektor perlu ditingkatkan.

Masih adanya pengelola program/penanggungjawab program yang belum mengelola dana yang diterimanya secara efektif yang disebabkan keterbatasan SDM baik jumlah maupun kualitas. Hal yang akan dilakukan untuk mengantisipasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi sehingga bila hal tersebut terjadi segera dapat dicarikan solusinya. Untuk kedepan pengawasan internal dari atasan langsung terhadap kinerja pelaksana program mutlak diperhatikan.

Kiranya Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan menempatkan Program Keluarga Berencana sebagai bagian dari prioritas pembangunan SDM dan memperhatikan sepenuhnya pembangunan yang berwawasan pemberdayaan keluarga,

karena bagaimanapun majunya pembangunan di semua sektor, tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada masyarakat terutama kategori Keluarga Pra Sejahtera dan KS I jika tidak diimbangi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Malili, Januari 2023

Kepala Dinas,

Dra. Hj. Puspawati
Pangkat : Pembina Tk.I
N I P:19670308 199402 2 002

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ----------i

DAFTAR ISI ---------- iii

BAB I. PENDAHULUAN 1 ----------

a. Gambaran Umum Organisasi----------1

b. Struktur Organisasi ----------3

c. Permasalahan Utama (strategic issued) **----------4**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ---------- 6

a. Rencana Strategis SKPD ----------6

1. Visi dan Misi ----------6

2. Tujuan dan sasaran strategis ----------8

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) ---------- 11

c. Perjanjian Kinerja ---------- 12

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ----------

16

A. Capaian Kinerja Organisasi ---------- 16

B. Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan ---------- 20

C. Realisasi Anggaran ---------- 27

BAB IV. PENUTUP 11

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Peningkatan akuntabilitas publik para penyelenggara Negara khususnya eksekutif pemerintahan, pada dasarnya merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, yang bersih dan bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sistem dan mekanisme yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan yang baik adalah system akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem ini merupakan langkah-langkah reformasi yang telah ditetapkan untuk peningkatan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Negara.

Sistem AKIP pada dasarnya merupakan system manajemen yang berorientasi pada hasil, yang merupakan salah satu instrument untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, transparan serta responsive terhadap aspirasi masyarkat dan lingkungan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah sebagai instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang mengemban urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan merupakan perpanjangan tangan instansi Pemerintah Pusat dalam hal ini BKKBN. Untuk itu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, dengan tugas pokok melaksanakan urusan otonomi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana .

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris membawahi:
   - Subbagian Perencanaan dan kepegawaian; dan
   - Subbagian Umum dan Keuangan.
3. Bidang Keluarga Berencana Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
   - Sub coordinator jabatan Fungsional;
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
   - Sub coordinator jabatan Fungsional dan
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, membawahi:
   - Sub coordinator jabatan Fungsional.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Permasalahan Utama (strategic issued)

Perencanaaan Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan lanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (Renstra) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, potensi permasalahan pelayanan didaerah pada umumnya timbul

kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Pada bagian ini akan diuraikan permasalahan paling krusial tentang layanan dasar OPD untuk mengetahui faktor-faktor internal dan ekstrenal yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

- Masih rendahnya keinginan bagi Pasangan Usia Subur untuk ber KB, padahal sudah tidak ingin memiliki anak lagi
- Masih rendahnya capaian peserta KB aktif pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
- Pusat atau lembaga advokasi dan konseling hak-hak dan kesehatan reproduksi bagi remaja yang ada saat ini masih sangat terbatas jangkauannya dan belum dapat memenuhi kebutuhan remaja
- Masih tingginya rata-rata usia kawin pertama bagi wanita
- Masih tingginya rata-rata jumlah anak per keluarga
- Pendapatan keluarga pra Sejahtera (KS) dan Keluarga Sejahtera 1 (KS1) yang rendah
- Masih kurangnya ketersediaan alat kontrasepsi.
- Belum optimalnya pemanfaatan data & informasi sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi program
- Pencatatan dan Pelaporan Rutin sebagai bahan monitoring dan evaluasi program tidak berjalan dengan baik

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, perencanaan strategic merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategic instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan serta tetap berada dalam tatanan system manajemen.

Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra SKPD merupakan RPJMD SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu 2021-2026. Lebih lanjut uraian pokok-pokok Rencana Strategis SKPD diuraikan dalam poin-poin selanjutnya.

1 Visi dan Misi SKPD

> **Visi** Merupakan gambaran masa depan tentang hal-hal yang diinginkan yang dapat membantu untuk mendefinisikan bagaimana pelayanan harus diselenggarakan. Visi harus inspiratif, menantang dan memberi motivasi kepada anggota instansi.

Mengacu pada batasan tersebut, maka visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur harus mendukung Visi Bupati Luwu timur periode 2021-2026 yaitu :

"Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya"

Terwujudnya visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur

Misi suatu Instansi sangat diperlukan untuk mengarahkan program, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, agar setiap kegiatan atau produk suatu instansi selalu mengarah kepada pencapaian visi (tujuan jangka panjang).

Dalam mencapai misi Bupati Luwu Timur dan wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menjalankan misi yaitu :

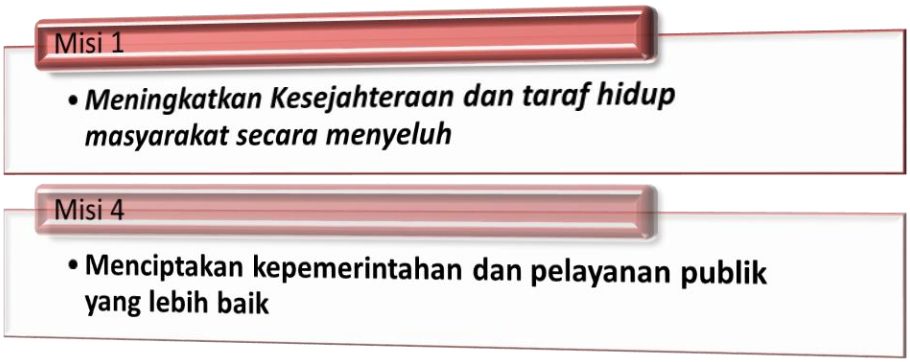

2 . Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai misi dan visi seperti yang telah dikemukakan terdahulu maka harus dijabarkan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan Strategis *(strategic goals)* organisasi.

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang menggambarkan arah strategis organisasi dan digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran yang efektif harus memenuhi kriteria spesifik, dapat dinilai dan terukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan, misi, dan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur periode 2021 – 2026, beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Tujuan dan sasaran startegis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur tahun -2021 – 2026

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Tujuan / Sasaran PD	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Meningkatkan Penduduk yang berkualitas		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,99	1,99	1,79	1,7	1,63	1,57	1,57
		Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak per wanita	2,79	2,66	2,6	2,53	2,47	2,4	2,4
		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks (Skala 1-100)	35,05	35,05	35,52	36,02	36,22	36,32	36,33
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	65	65	70	75	80	80	80
		Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	TFR = $5 \sum_{i=1}^{7} ASFR^{i}$ ASFR ¡ = $\frac{bi}{pif} \; x \; K$ Keterangan : TFR = Total Fertility Rate JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun
2	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100 Dimana : Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu **(a) Dimensi Ketentraman** dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; **(b) Dimensi Kemandirian** dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; **(c) Dimensi Kebahagiaan** dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;

C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Rencana kinerja tahun 2022 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tahunan yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, maka ditetapkan perjanjian kinerja antara Bupati Luwu Timur dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja.

Target Kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategi sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan Keluarga Berencana dan ketahanan keluarga Kabupaten Luwu Timur dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tahunan yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Program dan Pagu Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**2.870.367.026**	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.983.575	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.065.264.860	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	16.292.325	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	38.815.125	APBD

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	448.201.250	APBD
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.929.991	APBD
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.880.000	APBD
II	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**450.952.275**	
9	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	239.464.723	APBD
10	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	211.487.550	APBD
III	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**4.373.490.995**	
11	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	901.209.155	APBD, DAK NON FISIK
12	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.838.689.775	APBD, DAK NON FISIK
13	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.152.657.065	APBD, DAK NON FISIK
14	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	480.935.000	APBD, DAK NON FISIK
IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2.352.706.582**	
15	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.338.419.372	APBD, DAK NON FISIK, FISIK
16	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.287.210	APBD
	TOTAL	**10.047.516.878**	

Tabel 4

Perjanjian Kinerja TA. 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100%
2	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,6%

3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35,05

Untuk mendukung Program-program yang dijabarkan dalam tabel diatas dalam rangka pencapaian Sasaran, ditempuh dengan melakukan Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- ✓ sub.kegiatan Penyusunan dan pemanfataan Grand Design pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
- ✓ Sub kegiatan Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal
- ✓ Sub. Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- ✓ Sub kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota

- ✓ Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
- ✓ Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 14 sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

- ✓ Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
- ✓ Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
- ✓ Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- ✓ Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)
- ✓ Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK
- ✓ Pengendalian Program KKBPK

b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB PKBPLKB
   - ✓ Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
   - ✓ Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah KabupatenKota
   - ✓ Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya
   - ✓ Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
   - ✓ Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
   - ✓ Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya

d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah KabupatenKota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
   - ✓ Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
   - ✓ Pembinaan Terpadu Kampung KB

3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan yaitu:

a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - ✓ Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
   - ✓ Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
   - ✓ Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   - ✓ Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
   - ✓ Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   - ✓ Advokasi dan Promosi IPK

b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- ✓ Promosi dan Sosilisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   e. Fasilitas Kunjungan Tamu
   f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Hasil capaian kinerja, baik kekurangan maupun kelebihannya merupakan hasil kerja manajemen dalam mensinergikan berbagai sumber daya dan seluruh komponen yang ada pada lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur, tidak terkecuali pengaruh kondisi dan situasi yang melingkupinya. Dalam pelaksanaan pembangunan beberapa kebijakan telah diambil dan menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

3.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2022

Adapun capaian kinerja Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALIASI	%
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR	2,6	2,79	93,18
2	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35.05	53,07	151,41
3	Meningkanya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 diuraikan sasaran per sasaran strategis berikut indikator kinerjanya masing-masing. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Menurunnya Angka Kelahiran

a. Realisasi Indikator kinerja Untuk Sasaran I Tahun 2022

Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Total Fertility Rate (TFR)	2.6	2.79	93,18
Persentase Capaian Rata-rata			93,18

Sumber: BPS

Untuk menghitung TFR dengan rumus sebagai berikut:

$$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$$

ASFRi : ASFR untuk wanita pada kelompo usia ke-i

i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49

Keterangan :

TFR = Total Fertility Rate
JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.

JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.

Rata-rata capaian sasaran diatas tahun 2022 adalah sebesar 93,18 atau kategori belum mencapai target menjadi kinerja DPPKB tahun yang akan datang . Capaian realisasi tahun 2022 masih menggunakan realisasi tahun 2021 dikarenakan masih menunggu data dari BPS.

Untuk meningkatkan kinerja ditahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan lebih meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor serta konseling informasi dan edukasi pelayanan KB.

Upaya -upaya penting yang dilakukan dalam tahun 2022 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain:

a. Koordinasi dan Kerjasama dengan lintas sektor
b. Peningkatan Pelayanan KB
c. Adanya dukungan Operasional pelaksanaan bangga kencana ditingkat lini lapangan.
d. Meningkatkan Komunikasi,Informasi dan Edukasi

Adapun Program dan kegiatan pendukung pada indikator ini yakni :

1. Program Pengendalian Penduduk

Indikator Kinerja Program Pengendalian Penduduk yaitu Rata rata jumlah anak per keluarga (anak) yang diukur dengan Formula :

Rata-Rata Jumah anak per keluarga = $\frac{\text{Jumlah Anak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$

= $\frac{\text{87.301 anak}}{\text{71.044 KK}}$ x 100%

= 1,22%

Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 sub kegiatan yaitu:

a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah KabupatenKota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk. Adapun Sub Kegiatan yang mendukung capaian kegiatan ini adalah sebagai berikut :
   - ✓ sub.kegiatan Penyusunan dan pemanfataan Grand Design pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
   - ✓ Sub kegiatan Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal
   - ✓ Sub. Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
   - ✓ Sub kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

b. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota
   - ✓ Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
   - ✓ Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Program Pembinaan Keluarga Berencana yaitu:

- Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) ditargetkan 58,90% dan terealisasi 62,86 atau dengan capaian 112,68 % sehingg realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

$$= \frac{26.782}{42.606} \times 100 = 62,86$$

Capaian Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

No.	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Jumlah Pasangan Usia Subur	Prosentase (%)
1	BURAU	3.337	5.047	66,12
2	WOTU	3.203	4.738	67,60
3	TOMONI	2.791	4.415	63,22
4	MANGKUTANA	2.286	3.345	68,34
5	TOMONI TIMUR	1.487	2.135	69,65
6	KALAENA	1.383	2.029	68,16
7	ANGKONA	2.490	3.704	67,22
8	MALILI	3.511	5.971	58,80
9	WASUPONDA	1.294	2.259	57,28
10	TOWUTI	3.379	5.875	57,51
11	NUHA	1.621	3.088	52,49
	JUMLAH	**26.782**	**42.606**	**62,86**

- Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19), capaiannya : 35,41 tidak mengguna formulasi tetapi bersumber dari data SUSENAS 2019

- Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) ditargetkan 12,40% dan terealisasi 18,42 atau dengan capaian 148,63% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah PUS yang tidak ber KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$$

$$= \frac{8.207}{44.529} \times 100 = 18,43$$

Capaian Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

No.	Kecamatan	Jumlah PUS Yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani (Unmet Need)	Jumlah Pasangan Usia Subur	Prosentase (%)
1	BURAU	817	5.270	15,50
2	WOTU	822	4.976	16.52
3	TOMONI	879	4.610	19,07
4	MANGKUTANA	557	3.514	15,85
5	TOMONI TIMUR	256	2.266	11,30
6	KALAENA	320	2.117	15,12
7	ANGKONA	532	3.898	13,65
8	MALILI	1.302	6.201	21,00
9	WASUPONDA	590	2.373	24,86
10	TOWUTI	1.394	6.111	22,81
11	NUHA	738	3.193	23,11
	JUMLAH	**8.207**	**44.529**	**18,43**

- Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ditargetkan 39,14% dan terealisasi 35,64% atau dengan capaian 91,04% sehingga realisasi dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$= \frac{\text{jumlah pengunaan KB jangka panjang}}{\text{jumlah KB aktif}} \times 100$$

$$= \frac{9.544}{26.782} \times 100 = 35,64$$

Capaian Persenyase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

No.	Kecamatan	Jumlah metode Kontrasepsi Modern				Total	Jumlah Peserta KB Aktif Modern	Prosentase (%)
		IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI			
1	BURAU	976	109	0	131	1.216	3.337	36,44
2	WOTU	764	196	0	128	1.088	3.203	33,97
3	TOMONI	563	160	0	107	830	2.791	29,74
4	MANGKUTANA	459	277	2	88	826	2.286	36,13
5	TOMONI TIMUR	423	145	2	60	630	1.487	42,37
6	KALAENA	356	179	0	38	573	1.383	41,43
7	ANGKONA	741	274	13	75	1.103	2.490	44,30
8	MALILI	638	88	4	143	873	3.511	24,86
9	WASUPONDA	362	85	1	98	546	1.294	42,19
10	TOWUTI	704	233	3	269	1.209	3.379	35,78
11	NUHA	192	282	3	173	650	1.621	40,10
	JUMLAH	**6.178**	**2.028**	**28**	**1.310**	**9.544**	**26.782**	**35,64**

Faktor penentu utama keberhasilan Total Fertility Rate (TFR) adalah dilihat dari :

- usia perkawinan pertama
- program KB
- Tingkat Pendidikan
- status pekerjaan

Faktor Pendukung lainnya :

- Petugas lapangan (PLKB) di Luwu Timur jumlahnya di atas ratio PLKB nasional yakni 100 PLKB sementara jumlah desa yang ada hanya 127 desa.
- Adanya dukungan dari mitra (puskesmas dan RS sebagai penyedia tenaga medis dalam kegiatan pelayanan keluarga berencana)
- Dukungan anggaran yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari pusat melalui anggaran DAK.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga

Realisasi Indikator kinerja Untuk Sasaran 2 Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35,05	53,07	151,41 %
Persentase Capaian Rata-rata			151,41 %

Untuk mendapatkan angka realisasi digunakan perhitungan sebagai berikut :

iBangga = 1/3 (indeks ketentraman + Indeks kemandirian + indeks kebahagiaan) x 100

Dengan Formulasi perhitungan capaian target indikator 2 sebagai berikut :

$$\text{I bangga} = \frac{\text{Indeks ketentraman + Indeks Kemendarian + Indeks Kebahagian}}{\mathbf{3}}$$

$$\text{Ketentraman} = \frac{488.483}{68.888} \times 6 = 57,95$$

$$\text{Kemandirian} = \frac{411.460}{69.268} \times 7 = 41.58$$

$$\text{Kebahagian} = \frac{162.333}{29.502} \times 4 = 22.00$$

$$\text{I bangga} = \frac{57.95 + 52,30 + 48.97}{3}$$

$$= 53,07$$

Dimana:

Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu

(a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga;

(b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;

(c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2022 capaiannya diatas dari target yang ditetapkan yakni 35,05% realisasi 53,07% persentase capaian rata-rata yaitu 151,41 % berarti capaian diatas target yang ditentukan ini menunjukkan indeks pembangunan keluarga meningkat dari target, namun dilihat dari Indeks (Skala 1-100) angka ini masih masuk dalam kategori (rendah) dan menjadi tantangan untuk tetap menaikkan realisasi iBangga dengan melaksanakan program untuk mencapai indeks pembangunan keluarga.

Pemberdayaan keluarga di bidang ekonomi bertujuan untuk menumbuhkan dan menciptakan minat, semangat, keterampilan serta kinerja keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif. Melalui upaya ini keluarga khususnya keluarga Pra Sejahtera dan KS I diharapkan mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga.

Realisasi yang melebihi target ini harus tetap menjadi perhatian atau dikawal agar angka Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tetap dapat dipertahankan.

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga.

Pada dimensi ketentraman terdiri dari 4 indikator, yaitu kegiatan Ibadah, Legalitas keluarga, Jaminan kesehatan dan Keharmonisan keluarga. Adapun variabelnya ada 6 yaitu : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga (usia 10 tahun ke atas) menjalankan ibadah secara rutin sesuai dengan tuntunan agama atau kepercayaan yang dianut, (2) Keluarga memiliki buku/akta nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (3) Setiap anak (usia 0- 17 tahun) dalam keluarga memiliki akta lahir yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, (4) Setiap anggota keluarga memiliki kartu jaminan kesehatan (pemerintah/swasta), (5) Selama 6 bulan terakhir, terdapat konflik : a)Tanpa tegur sapa; b) Pisah ranjang antara suami dan istri; c) Anggota keluarga pergi dari rumah/minggat; d) Kekerasan dalam rumah tangga antar anggota keluarga, (6) Keluarga mengalami cerai hidup.

Kemudian pada Dimensi Kemandirian terdiri dari 5 indikator yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar, Keberlangsungan pendidikan, Kesehatan keluarga, Akses informasi, dan Jaminan keuangan. Adapun variabelnya ada 7 terdiri dari: (1) Selama 6 bulan terakhir, terdapat paling sedikit 1 anggota keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok per bulan, (2) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga makan “makanan beragam” (makanan pokok, sayur/buah dan lauk) paling sedikit 2 kali sehari, (3) Keluarga tinggal dalam rumah layak huni, (4) Keluarga memiliki tabungan/simpanan (uang kontan, perhiasan, hewan ternak, hasil kebun, dll) yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam 3 bulan kedepan, (5) Setiap anggota keluarga yang saat ini berusia

sekolah (7-18 tahun) tidak ada yang putus sekolah di SD/Sederajat sampai dengan SLTA/sederajat), (6) Selama 1 bulan terakhir, terdapat anggota keluarga yang sakit 4 hari berturut-turut sehingga meninggalkan aktifitas , (7) Keluarga memiliki akses informasi dari media online (internet)

Dimensi Kebahagiaan terdiri dari 2 indikator yaitu Interaksi keluarga dan Interaksi sosial. Adapun variabelnya ada 4 yang terdiri dari : (1) Selama 6 bulan terakhir, setiap anggota keluarga memiliki waktu untuk berinteraksi setiap hari, (2) Selama 6 bulan terakhir, pengasuhan anak dilakukan bersama antara suami dan istri, (3) Selama 6 bulan terakhir, keluarga pernah berekreasi bersama di luar rumah, (4) Selama 6 bulan terakhir, keluarga ikut serta dalam kegiatan sosial / gotong royong di lingkungan RT.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2021-2022.

Tabel. 3.3

Perbandingan Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Total Fertility rate (TFR)	2.66%	2,79	2,6	2,79

Perbandingan realisasi pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya mulai tahun 2021-2022 tidak mengalami kenaikan hal ini dapat kita lihat pada tabel. Namun Pada tahun 2021 Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2,79 dan Pada tahun 2022 pencapaiannya sebesar 2,79, TFR ditentukan oleh Batasan target tahun 2022 ada pada angka 2,6 realisasi 2,79 % sehingga indikator ini dikatakan belum mencapai target karena Total Fertility Rate (TFR) realisasi 2,79% angka ini diatas dari batas target yang ditentukan. Dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

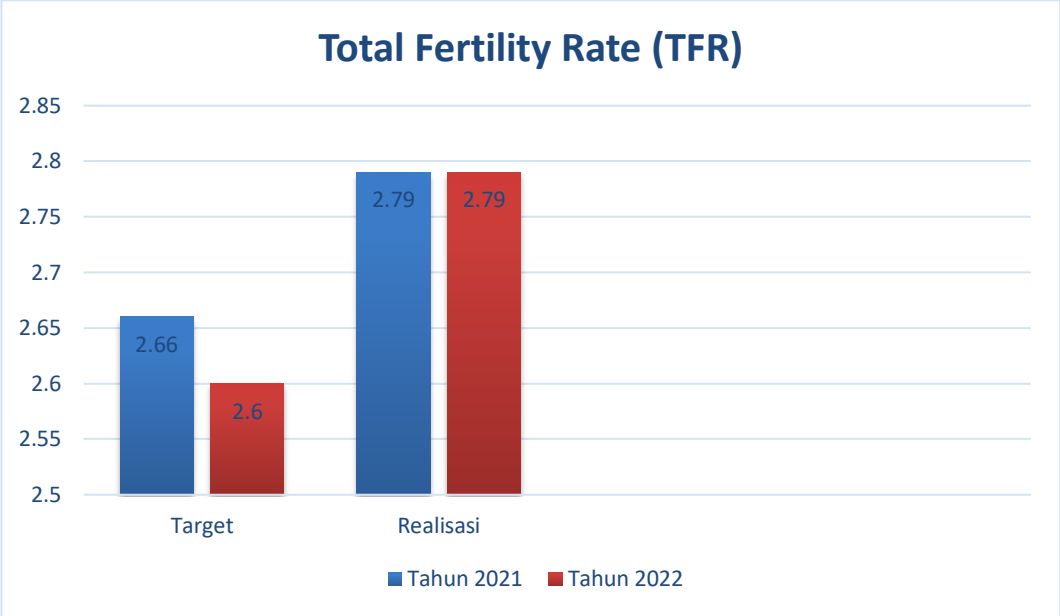

1. Program Keluarga Berencana

Target program tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Target dan Realisasi Kinerja Tahun Lalu dan Tahun Terakhir

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen)	15,61 %	35,41%	28,16%	35,41 %
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	36,64 %	37,30%	37,89%	34,24 %
		Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen)	13,46 %	18,43%	12,88%	20,45 %
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	57,20 %	56,90%	58,00%	66,37 %

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan (Balai Penyuluhan)	12	12	12	12
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Sarana KIE yang disediakan (jenis)	8	8	8	8
2	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan dan Distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)	11.500	11.635	11.500	9.545
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan Distribusi Alokon (Fasilitas Kesehatan)	21	21	21	21
	Penyediaan	Jumlah sarana yang				

No	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan / subkegiatan (Output)	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
	Sarana Penunjang Pelayanan KB	tersedia (Unit)	422	422	27	27

Perbandingan capaian realisasi kinerja tahun lalu dan tahun 2022 ada beberapa yang mengalami penurunan dimana jika capaian dari tahun ke tahun mengalami penurunan maka dikatakan berhasil dapat dilihat pada tabel diatas seperti capaian realisasi **Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (persen), Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak terpenuhi (unmeetneed) (persen),** Namun ada juga indikator ini sifatnya dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan capaian dari tahun sebelumnya yaitu **Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%),Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)**

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga

Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	35.52%	53,07	35,05	53,07

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja pada tahun 2021 sebesar 53,07% dan pada Tahun 2022 sebesar 53,07 % ,sehingga capaian ini tahun 2022 sama dengan capaian tahun 2021.

Dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

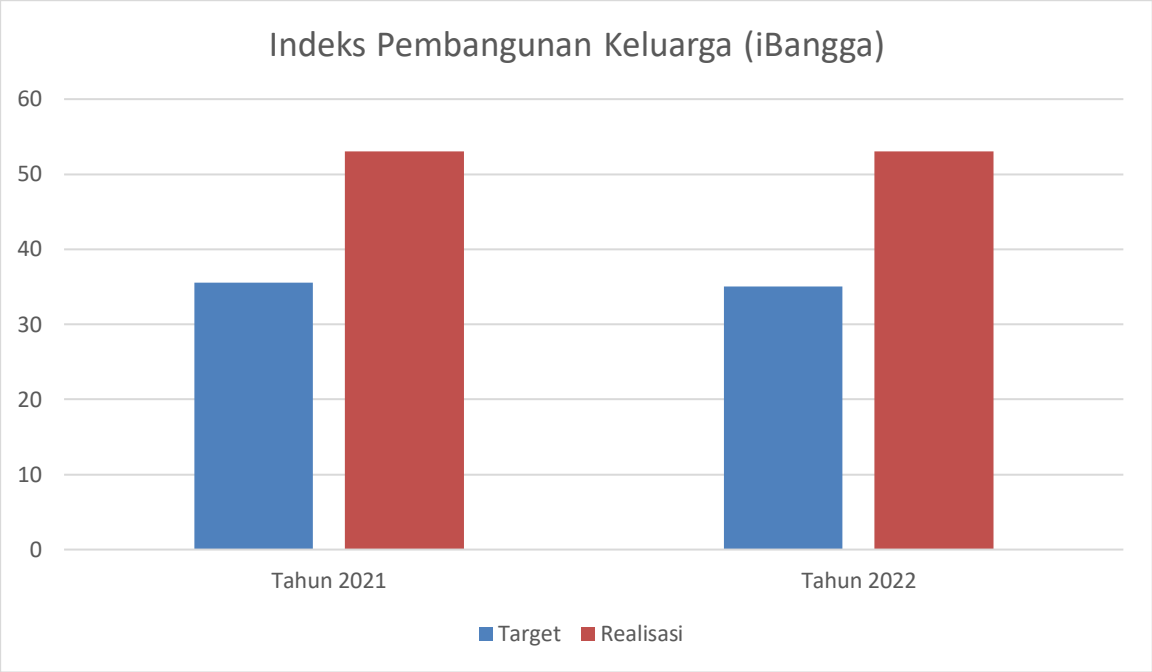

Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan secara terus menerus adalah :

1. Persentase Akseptor terhadap PUS, kendala yang biasa ditemukan antara lain :
   - Adanya PUS yang belum memiliki anak
   - PUS yang berhenti ber KB karena ingin anak lagi
   - Adanya sebagian PUS yang merasa tidak cocok dengan alat kontrasepsi sehingga lebih memilih untuk tidak ber KB
   - Keterbatasan penyediaan alat kontrasepsi yang selama ini hanya menunggu drop dari pusat
   - Beberapa efek samping penggunaan alat dan obat kontrasepsi, bahkan kejadian kehamilan pada akseptor mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap efektifitas penggunaan alat dan obat kontrasepsi utamanya pada penggunaan alat dan obat kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
2. Pembinaan dan pendampingan kelompok kegiatan (Tribina, UPPKS), beberapa kendala yang ditemukan antara lain :
   - Petugas Pembina kelompok kegiatan (Poktan) dalam hal ini PLKB, PKB, PPKBD, Sub PPKBD dan Kader kelompok kegiatan yang terkait masih ada yang belum terampil.

✓ **Upaya Pemecahan Masalah**

- Melakukan pelayanan KB secara menyeluruh mulai dari daerah perkotaan, daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dengan tetap mematuhi prokoler Kesehatan.
- Meningkatkan intensitas Pembina oleh tenaga lini lapangan (PKB,PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan kader kelompok kegiatan).
- Peningkatan keterampilan bagi tenaga lini lapangan (PKB,PLKB, PPKBD, Sub PPKBD dan kader kelompok kegiatan).

Adapun kegiatan pendukung pada indikator ini yakni:

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Indikator Kinerja Program Pembinaan Keluarga Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yaitu Rata-rata usia Kawin Pertama

Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 7 sub kegiatan yaitu:

c. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - ✓ Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
   - ✓ Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
   - ✓ Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   - ✓ Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)
   - ✓ Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
   - ✓ Advokasi dan Promosi IPK

d. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - ✓ Promosi dan Sosilisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja

a.2 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung

Indikator kinerja Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga, dengan indikator : Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

2. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Target program tahun 2021 dan 2022 dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan/Sub kegiatan (Output)	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Rata-rata Usia kawin pertama**	**50,94**	**52,8**	**20 tahun**	**20 tahun**
2	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga (persen)**	**71,13**	**72**	**71,18**	**71,73**
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan (kelompok)	50	50	60	60
	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan	Jumlah Kelompok yang terbentuk (kelompok)	5	5	6	6

	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)					
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL, BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut promosi dan sosialisasi (kelompok)	25	25	26	26

Dari tabel diatas dapat dilihat target tahun 2022 yaitu **20 tahun** dengan realisasi **20 Tahun** menjelaskan bahwa program pendukung dalam dalam meningkatkan indeks pembangunan keluarga (ibangga) mengalami peningkatan dari tahun sebelumya, dalam menjalankan program tersebut didukung oleh kegiatan kegiatan dalam yang dapat meningkatkan perkembangan pembangunan keluarga dilingkup masyarakat.

Sasaran 3 : **Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah**

a. Realisasi Indikator kinerja Untuk Sasaran 3 Tahun 2022

Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
Meningkanya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	100	100	100
Persentase Capaian Rata-rata			100 %

Indikator kinerja program yaitu Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar yang diukur dengan formula:
membandingkan antara Jumlah Realisasi Kegiatan dibagi Jumlah Target Kegiatan dikali 100%.

Presentase penunjang urusan perangkat daerah

$$= \frac{\text{Jumlah realisasi kegiatan}}{\text{Jumlah target kegiatan}} \times 100\%$$

$$= \frac{700}{7} \times 100\% = 100\%$$

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 kegiatan yaitu:**

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah
   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
   - Fasilitas Kunjungan Tamu
   - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
   - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja untuk Tahun 2020 dan 2021

Tabel 21

Realisasi Indikator kinerja Untuk Sasaran 3 Tahun 2020

Indikator Kinerja	2020		2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Skor LAKIP	65	65,63	60	70.90

- Analisis capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 menunjukkan jumlah skor LAKIP diatas target yakni sebesar 65,36 dari target 65 atau dengan kata lain skor tersebut mendapatkan predikat “B”. Namun demikian hasil evaluasi sakip tetap memperhatikan penilaian sebagai berikut :

2 Perjanjian kinerja sudah dibuat secara berjenjang, namun belum sampai pada tingkat individu;

3 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapainnya sampai dengan tahun berjalan, tetapi kriteria monitoring belum memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodic;
- Terdapat jadwal mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodic;
- Terdapat dekomentasi hasil capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja;

- Terdapat tindak lanjut atau hasil monitoring

3 Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang sampai pada eselon IV, namun perlu ditingkatkan sampai pada tingkat staf (individu)

4. Perlu melakukan analisis mendalam mengenai capaian kinerja membuat perbandingan capaian kinerja sampai pada tingkat nasional, menyajikan analisis terhadap efesiensi yang dilakukan dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian tiap sasaran.

3.1.4. Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2022 dengan capaian BKKBN Provinsi dan capaian BKKBN Nasional menurut PK 2021

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur Tahun 2022 dengan target BKKBN Provinsi dan target BKKBN Nasional Menurut PK 2021.

o.	**dikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	**atuan**	**apaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2022**		**get Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024**	**rget Renstra BKKBN Nasional 2020-2024**
			Target	**ealisasi**	**2022**	**2022**
	Fertility Rate (TFR)					
	ıkaian kontrasepsi modern (modern contraseptive prevalence rate / mCPR)		)	7	4	)
	tuhan ber KB yg tidak terpenuhi (Unmetneed)		3		)	)
	ks Pembangunan Keluarga (iBangga)		;	7	?	)
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility*		;			

o.	dikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	atuan	apaian Kinerja DPPKB kab.Luwu Timur Tahun 2022		get Renstra BKKBN Provinsi SulSel 2020-2024	rget Renstra BKKBN Nasional 2020-2024
			Target	ealisasi	2022	2022
	Rate/**ASFR 15-19)**					
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (**MUKP**) seluruh wanita umur 25-49 tahun	n			)	l

Pada tabel 3.3 diatas dari keempat indikator utama DPPKB Kab.Luwu Timur Tahun 2022 yang menarik perhatian adalah capaian angka TFR. Bila dibandingkan dengan capaian Renstra BKKBN Provinsi maupun capaian BKKBN Nasional, angka 16.59% masih jauh dari harapan. Hal ini masih menjadi "PR" utama bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu Timur, bagaimana strategi dan upaya untuk menurunkan angka TFR tersebut.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.

1. TFR.

   Banyak faktor yang mempengaruhi tingginya Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi.

2. mCPR

Peningkatan capaian kinerja mCPR dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya meningkatnya sinergitas fasilitas kesehatan mitra kerja melalui fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, serta adanya perayaan momentum tahunan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan KB gratis.

3. Unmetneed.

masih kuatnya peran agama dan budaya terkait pemahaman tentang KB.

3.1.6. **Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**.

program/kegiatan apa saja di tahun 2022 yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh anggaran sebesar Rp. **10,047,516,878.00**,- dimana 49% anggaran atau sebesar Rp. 4.920.886.878,- berasal dari dana APBD murni dan APBD Perubahan, dan sisanya 51 % atau sebesar Rp. 5.126.630.000,- berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), yang terbagi dalam 4 Program, 15 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Hasil realisasi sampai dengan triwulan IV, total rata-rata Capaian Kinerja dari seluruh program 1 s.d. program 4 (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana/KB, dan Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera/KS) sebesar 90,42% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi (ST). Rata-rata Capaian Anggaran dari seluruh program 1 s.d. program 4 adalah 99,93% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi (ST) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang ada pada tahun 2022 menunjang keberhasilan pencapaian kinerja DPPKB Kab. Luwu Timur

3.2 Realisasi Anggaran

Dari total Anggaran Rp. 10.047.516.878,- per 31 Desember 2022 dapat terealisasi senilai Rp. 9.084.872.340,- atau sebesar 90,42 %. Untuk Belanja Operasi dengan alokasi Rp.9.624.866.878,- dapat terealisasi sebesar Rp. 8,662,223.990,- atau sebesar 90,00%. Sedangkan Belanja Modal dengan alokasi Rp. 422.650.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 422.648.350 atau sebesar 100 %. Dapat dilihat dengan tabel sbb:

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	BELANJA	**10.047.516.878,00**	**9.084.872.340,00**	**90,42**
1	**BELANJA OPERASI**	**9.624.866.878,00**	**8.662.223.990,00**	**90,00**
	Belanja Pegawai	2.071.680.110,00	2.046.258.399,00	98,77
	Belanja Barang dan Jasa	7.553.186.768,00	6.615.965.591,00	87,59
2	**BELANJA MODAL**	**422.650.000,00**	**422.648.350,00**	**100**

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	422.650.000,00	422.648.350,00	100
	Total	**10.047.516.878,00**	**9.084.872.340,00**	**90,42**

NO.	Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan	ANGGARAN 2022 Sebelum Perubahan (Rp)	ANGGARAN 2022 Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	Capaian %
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA**	**2,893,406,999**	**2,870,367,026**	**2.839.363.133**	**98,92**
1	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**48,983,575**	**48,983,575**	**48.447.850**	**98,91**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,367,325	17,367,325	17.277.175,00	99,48
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	3,004,375	3,004,375	3.003.500,00	99,97
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	3,001,875	3,001,875	3.001.000,00	99,97
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,610,000	25,610,000	25.166.175,00	98,27
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2,135,649,833**	**2,065,264,860**	**2.041.837.399**	**98,87**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2,106,285,083	2,029,400,110	2.006.678.399	98,88
6	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	29,364,750	35,864,750	35,1590,00	98,03
3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	**16,292,325**	**16,292,325**	15.854.300	97,31
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16,292,325	16,292,325	15.854.300	97,31
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**41,080,125**	**38,815,125**	38.115.200	98,20
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25,000,125	25,000,125	24.895.200	99,58
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	16,080,000	13,815,000	13.220.000	95,69
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**428,591,150**	**487,201,150**	486.179.947	99,79
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,256,550	3,256,550	3.256.500	100
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,841,600	5,841,600	5.665.000	96,98
13	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7,500,000	7,500,000	7.488.100	99,84
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,120,000	6,120,000	5.520.000	90,20
15	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,100,000	11,600,000	11.576.000	99,79
16	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	396,773,000	452,883,000	452.678.347	99,95
6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**102,929,991**	**108,929,991**	**104.113876**	**95,58**
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,929,991	14,929,991	14.929.000	99,99
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50,400,000	56,400,000	51.584.876	91,46
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	37,600,000	37,600,000	37.600.000	100
7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**119,880,000**	**104,880,000**	**104.814.561**	**99,94**
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	88,000,000	88,000,000	87.982.561	99,98
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,880,000	6,880,000	6.832.000	99,30
22	Pemeliharaan / Rehabilitasi	25,000,000	10,000,000	10.000.000	100

	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**461,442,275**	**450,952,275**	**382.274.835**	**84,77**
8	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**264,059,725**	**239,464,725**	**176.678.200**	**73,78**
23	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	192,000,000	180,990,000	121.575.000	67,17
24	Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal	20,001,350	20,001,350	19.592.000	97,95
25	Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	26,707,595	14,747,595	12.991.200	88,09
26	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	25,350,780	23,725,780	22.520.000	94,92
9	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**197,382,550**	**211,487,550**	205.596.635	97,21
27	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	79,782,450	93,887,450	90.415.028	96,30
28	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	117,600,100	117,600,100	115.181.607	97,94
3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**4,392,436,495**	**4,373,490,995**	**4.345.230.599**	**99,35**
10	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal**	**905,984,155**	**901,209,155**	**892.487.050**	**99,03**
30	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	19,135,605	19,135,605	19.013.000	99,36
31	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	59,800,750	41,425,750	41.303.400	99,70
32	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70,640,000	70,640,000	70.640.000	100
33	Pelaksanaan Mekanisme Operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)	171,600,000	185,200,000	185.182.050	99,99
34	Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	544,897,800	544,897,800	536.443.600	98,45
35	Pengendalian Program KKBPK	39,910,000	39,910,000	39.905.000	99,99
11	**Pendayagunaan Tenaga**	**1,839,289,775**	**1,838,689,775**	**1.838.434.300**	**99,99**

	Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				
36	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	126,102,000	125,502,000	125.416.950	99,93
37	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1,713,187,775	1,713,187,775	1.713.017.350	99,99
12	**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**1,177,237,565**	**1,152,657,065**	**1.152.356.599**	**99,97**
38	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	36,659,190	42,209,190	42.107.100	99,76
39	Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	655,840,875	678,197,875	678.147.549	99,99
40	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	475,137,500	422,650,000	422.548.350	100
41	Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	9,600,000	9,600,000	9.453.600	98,48
13	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelqaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB**	**469,925,000**	**480,935,000**	**461.952.650**	**96,05**
42	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	414,000,000	414,000,000	395.450.000	95,52
43	Pembinaan Terpadu Kampung KB	55,925,000	66,935,000	66.502.650	99,35
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**2,430,706,662**	**2,352,706,582**	**1.518.818.773**	**64,56**
14	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**2,414,109,452**	**2,338,419,372**	**1.505.557.273**	**64,38**
44	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	19,602,900	17,466,900	17.066.900	97,71
45	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB,	525,200,000	447,200,000	445.177.800	97,71

	BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)				
46	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	168,142,420	172,727,420	171.106.100	99,06
47	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	1,585,380,000	1,585,380,000	758.750.710	47,86
48	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	98,640,452	105,956,372	103.803.263	97,97
49	Advokasi dan Promosi IPK	17,143,680	9,688,680	9.652.500	99,63
15	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**16,597,210**	**14,287,210**	**13.261.500**	**92,82**
50	Promosi dan Sosilisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagi mitra Kerja	16,597,210	14,287,210	13.261.500	92,82
	BELANJA OPERASI	**9.702.854.931**	**9.624.866.878**	**8.662.223.990,**	
	BELANJA MODAL	**475.137.500**	**422.650.000**	**422.648.350,00**	
	TOTAL BELANJA	**10,177,992,431**	**10,047,516,878**	**9.085.687.340**	**90,42**

Pencapaian Sasaran Kinerja Instansi Tahun 2022

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggungjawab	ket
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		-																									
	I	**Program Peniunjang urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%) (persen)**					**100%**	**2,870,367,026**	**100%**	**472,145,791**	**100%**	**798,112,258**	**100%**	**770,366,155**		**796,688,929**	**100%**	**2,837,313,133**	**100.00%**	**98.85%**		**2,837,313,133**				
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu**					**100%**	**48,983,575**	**100%**	**3,839,000**	**100%**	**13,817,800**	**100%**	**7,825,500**	**-**	**22,965,550**	**100%**	**48,447,850**	**100.00%**	**98.91%**		**48,447,850**				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusuntepat waktu					3	17,367,325	1	1,428,000	1	6,187,000	1	4,081,000.00		5,581,175	3	17,277,175	100.00%	99.48%	3.00	17,277,175				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPDyang disusun tepat waktu					2	3,004,375	-	-	2	1,139,000	0	1,864,500.00		-	2	3,003,500	100.00%	99.97%	2.00	3,003,500				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu					2	3,001,875	-	-	2	1,219,000	0	731,000.00		1,051,000	2	3,001,000	100.00%	99.97%	2.00	3,001,000				
		Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Jumlah Laporan Kinerja Perangkat daerah yang disusun tepat waktu					8	25,610,000	2	2,411,000	2	5,272,800	2	1,149,000.00	2	16,333,375	8	25,166,175	100.00%	98.27%	8.00	25,166,175				
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah**					**100%**	**2,065,264,860**	**100%**	**329,704,668**	**100%**	**620,897,147**	**100%**	**562,641,029**		**526,544,555**	**100%**	**2,039,787,399**	**100.00%**	**98.77%**	1.00	2,039,787,399				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan					18	2,029,400,110	17	328,338,168	17	609,979,647	18	553,502,029.00	**18**	512,158,555	18	2,003,978,399	100.00%	98.75%	18.00	2,003,978,399				
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu					13	35,864,750	3	1,366,500	2	10,917,500	4	9,139,000.00	1	14,386,000	13	35,809,000	100.00%	99.84%	13.00	35,809,000				

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggungjawab	ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5		16	17
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah**	**Persentase Barang milik daerah pada perangkat daerah yang ditatausahakan**					**100%**	**16,292,325**	**25%**	**642,000**	**25%**	**4,842,000**	**25%**	**2,791,800**	**25%**	**7,578,500**	**100%**	**15,854,300**	**100.00%**	**97.31%**	1.00	15,854,300				
		Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah yang disusun tepat					4	16,292,325	1	642,000	1	4,842,000	1	2,791,800.00	**1**	7,578,500	4	15,854,300	100.00%	**97.31%**	4.00	15,854,300				
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**	**Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah**					**100%**	**38,815,125**	**20%**	**9,653,000**	**30%**	**14,378,000**	**25%**	**6,389,000**	**25%**	**7,695,200**	**100%**	**38,115,200**	**100.00%**	**98.20%**	1.00	38,115,200				
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan					8	25,000,125	2	2,793,000	2	8,018,000	2	6,389,000.00	2	7,695,200	8	24,895,200	100.00%	**99.58%**	8.00	24,895,200				
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					2	13,815,000	1	6,860,000	-	6,360,000	0	0.00		-	2	13,220,000	100.00%	**95.69%**	2.00	13,220,000				
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Umum perangkat daerah**					**100%**	**487,201,150**	**25%**	**73,246,150**	**25%**	**100,680,440**	**25%**	**137,317,827**	**25%**	**174,935,530**	**100%**	**486,179,947**	**100.00%**	**99.79%**	1.00	486,179,947				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					2	3,256,550	2	814,000	2	814,000	2	814,000.00	**2**	814,500	2	3,256,500	100.00%	**100.00%**	2.00	3,256,500				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan					203	5,841,600	25	1,241,000	50	1,312,000	50	1,462,500.00	**78**	1,649,500	203	5,665,000	100.00%	**96.98%**	203.00	5,665,000				
		Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yangdisediakan					3	7,500,000	3	350,000	3	2,910,000	3	1,300,500.00	**3**	2,927,600	3	7,488,100	100.00%	**99.84%**	3.00	7,488,100				
		Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganyang disediakan					60	6,120,000	15	1,320,000	15	1,180,000	15	1,480,000.00	**12**	1,540,000	57	5,520,000	95.00%	**90.20%**	57.00	5,520,000				
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya					125	11,600,000	21	760,000	68	940,000	68	3,936,000.00	**103**	5,940,000	260	11,576,000	208.00%	**99.79%**	260.00	11,576,000				
		Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan KonsultasiSKPD Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan					411	452,883,000	20	68,761,150	189	93,524,440	53	128,324,827.00	**124**	162,063,930	386	452,674,347	93.92%	**99.95%**	386.00	452,674,347				

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggu ngjawab	K
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Rata-Rata Capaian Kiner jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**					**100%**	**108,929,991**	**25%**	**25,786,103**	**25%**	**18,893,090**	**25%**	**27,232,849**		**32,201,834**	**75%**	**104,113,876**	**75.00%**	**95.58%**	0.75	104,113,876				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan					400	14,929,991	130	3,732,000	245	2,732,000	195	3,732,000.00	230	4,733,000.00	800	14,929,000	200.00%	99.99%	800.00	14,929,000				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan					48	56,400,000	12	13,054,103	12	10,161,090	12	14,500,849.00	12	13,868,834.00	48	51,584,876	100.00%	91.46%	48.00	51,584,876				
		Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yangdibayarkan					3	37,600,000	3	9,000,000	3	6,000,000	3	9,000,000.00	3	13,600,000.00	3	37,600,000	100.00%	100.00%	3.00	37,600,000				
	8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik**					**100%**	**104,880,000**	**25%**	**29,274,870**	**25%**	**24,603,781**	**25%**	**26,168,150**	**0.25**	**24,767,760**	**100%**	**104,814,561**	**100.00%**	**99.94%**	1.00	104,814,561				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas Atau Kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara					96	88,000,000	10	18,024,870	48	23,123,781	25	24,678,150.00	13	22,155,760	96	87,982,561	100.00%	99.98%	96.00	87,982,561				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					3	6,880,000	1	1,720,000	2	1,480,000	0	1,140,000.00	3	2,492,000	3	6,832,000	100.00%	99.30%	3.00	6,832,000				
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					2	10,000,000	1	9,530,000	-	-	1	350,000.00	-	120,000	2	10,000,000	100.00%	100.00%	2.00	10,000,000				
									2,870,367,026	**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**										99.99%	98.85%						

																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
	II	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata rata jumlah anak per keluarga (anak)					2.02	450,952,275		16,283,250		65,309,191	-	103,482,044	-		-	382,274,835	0.00%	84.77%	0.00	382,274,835				
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk) (Nilai)					2	239,464,725		3,685,000		24,870,000		30,158,200		117,965,000	-	176,678,200	0.00%	73.78%	0.00	176,678,200				

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggu ngjawab	K
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah GDPK kabupaten yang disusun					1	180,990,000	-	1,415,000	-	2,350,000	0	3,940,000.00	1	113,870,000	1	121,575,000	100.00%	67.17%	1.00	121,575,000				
		Implementasi pendidikan Kependudukan jalur pendidikan formal dan Nonformal	Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) (Nilai)					3	20,001,350	-	2,270,000	-	-	2	16,540,000.00		782,000	2	19,592,000	66.67%	97.95%	2.00	19,592,000				
		Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta ModelSolusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Peserta Sosialisasi (Nilai)					24	14,747,595	-	-	-	-	24	9,678,200.00		3,313,000	24	12,991,200	100.00%	88.09%	24.00	12,991,200				

		Pelaksanaan Rapat Pengendalian ProgramKKBPK	Jumlah Peserta Rapat (orang)					130	23,725,780	-	-	130	22,520,000	0	0.00		-	130	22,520,000	100.00%	94.92%	130.00	22,520,000			
	10	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan data mikro keluarga di setiap desa (persen)**					**100**	**211,487,550**	**25%**	**12,598,250**	**25%**	**40,439,191**	**25%**	**73,323,844**	**25%**	**79,235,350**	**100%**	**205,596,635**	1.00%	**97.21%**	1.00	205,596,635			
		Penyediaan Data danInformasi Keluarga	Jumlah jenis data keluarga yang ada (jenis)					3	93,887,450	3	4,602,000	3	10,361,850	3	35,976,528.00	3	39,474,650	3	90,415,028	100.00%	96.30%	3.00	90,415,028			
		Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB						3	117,600,100	1	7,996,250	1	30,077,341	1	37,347,316.00	3	39,760,700	6	115,181,607	200.00%	97.94%	6.00	115,181,607			
									450,952,275	**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**										98.52%	84.77%					
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi					
	III	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**	**Rata rata jumlah anak per keluarga**	**2.02**		**0.00**			**4,373,490,995**		**239,608,800**		**743,279,100**	**-**	**1,282,756,050**		**2,079,586,649**		**3,883,277,949**	0.00%	**88.79%**	0.00	3,883,277,949			

No	**Kode**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)**	**Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)**		**Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan**		**Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi**		**Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan**								**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d**		**SKPD Penanggungjawab**	**K**
										I		**II**		**III**		**IV**											
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**		**7**		**8**		**9**		**10**		**11**		**12**		**13=12/7x100%**		**14 = 6 + 12**		**15=14/5**		**16**	
				K	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**	**K**	**Rp**		
	11	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (Advokasi dan KIE) (persen)**					**100**	**901,209,155**		**105,154,450**		**97,910,500**		**273,401,950**		**416,020,150**	**100**	**892,487,050**	100.00%	**99.03%**	100.00	892,487,050			
		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Peserta AdvokasiProgram KKBPK (orang)					40	19,135,605	40	15,013,000	-	4,000,000	0	0.00	-	-	40	19,013,000	100.00%	99.36%	40.00	19,013,000			

		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Peserta KIE (orang)					625	41,425,750	-	144,000	350	16,109,400	275	2,450,000.00	-	22,600,000	**625**	41,303,400	100.00%	99.70%	625.00	41,303,400			
		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massadan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media promosi danKIE yang tersedia (jenis)					2	70,640,000	-	-	-	-	0	0.00	2	70,640,000	**2**	70,640,000	100.00%	100.00%	2.00	70,640,000			
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (minilok)	Jumlah Peserta rapat koordinasi dan minilokakarya(orang)					300	185,200,000	-	-	-	-	300	73,300,000.00	300	111,882,050	300	185,182,050	100.00%	99.99%	300.00	185,182,050			
		Pengelolaan Operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai yang mendapat dukungan Operasional Pembiayaan					12	544,897,800	12	89,997,450	12	77,801,100	12	197,651,950.00	12	170,993,100	12	536,443,600	100.00%	98.45%	12.00	536,443,600			
		Pengendalian ProgramKKBPK	Jumlah program KKBPK yang dikendalikan (Nilai)					2	39,910,000	-	-	-	-	0	0.00	2	39,905,000	**2**	39,905,000	100.00%	99.99%	2.00	39,905,000			
	12	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk**					**100%**	**1,838,689,775**	**100%**	**26,139,000**	**100%**	**450,931,400**	**100%**	**477,337,800**		**884,026,100**	**100%**	**1,838,434,300**	100.00%	**99.99%**	1.00	1,838,434,300			

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggu ngjawab	
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

		Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk petugas keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang dibina (orang)					100	125,502,000	100	25,262,000	100	33,934,050	100	24,000,000	100	42,220,900	100	125,416,950	100.00%	99.93%	100.00	125,416,950			
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang diberdayakan (orang)					581	1,713,187,775	-	877,000	581	416,997,350	581	453,337,800	581	841,805,200	581	1,713,017,350	100.00%	99.99%	581.00	1,713,017,350			
	13	**Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (persen)**					**100**	**1,152,657,065**	**100**	**9,368,000**	**100**	**183,649,150**	**100**	**417,622,650**		**541,716,799**	**100**	**1,152,356,599**	100.00%	**99.97%**	100.00	1,152,356,599			
		Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan & Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Mendapatkan DistribusiAlokon (Fasilitas Kesehatan)					21	42,209,190	21	6,220,000	21	4,580,000	21	10,484,650.00	21	20,822,450	21	42,107,100	100.00%	99.76%	21.00	42,107,100			
		Peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor MKJP (akseptor)					11,500	678,197,875	11,256	3,148,000	11,258	179,069,150	11,300	258,941,900.00	10,738	236,988,499	11,500	678,147,549	100.00%	99.99%	11500.00	678,147,549			
		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana yang tersedia (Unit)					27	422,650,000	-	-	-	-	16	145,762,500.00	11	276,885,850	27	422,648,350	100.00%	100.00%	27.00	422,648,350			
		Pembinaan Pelayanan keluarga berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasukjaringan dan jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dibina (Faskes)					21	9,600,000	-	-	-	-	21	2,433,600.00	21	7,020,000	**21**	9,453,600	100.00%	98.48%	21.00	9,453,600			
	14	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelqaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB**	**Jumlah Stakholder/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (Termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK (Nilai)**					**100%**	**480,935,000**	**100%**	**98,947,350**	**100%**	**10,788,050**	**100%**	**114,393,650**		**237,823,600**	**100%**		100.00%	**0.00%**	1.00	-			
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di KampungKB	Jumlah Program KKBPK yang dilaksanakan di Kampung KB (Nilai)					2	414,000,000	2	90,575,000	2	4,375,000	2	99,300,000.00	2	201,200,000	2	395,450,000	100.00%	95.52%	2.00	395,450,000			

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerjadan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan RealisasiAnggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggu ngjawab	K
										I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5		16	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan Terpadu KampungKB	Jumlah kampung KB yang terbina (Kecamatan)					24	66,935,000	24	8,372,350	24	6,413,050	24	15,093,650.00	24	36,623,600	24	66,502,650	100.00%	99.35%	24.00	66,502,650				
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100.00%**	**99.35%**				
									4,373,490,995										**Predikat Kinerja**		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
	IV	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Rata-rata usia Kawin Pertama**					**20.00**	**2,352,706,582**	**0**	**47,756,900**	**0**	**38,018,163**	**-**	**140,062,000**	**-**	**-**	**20**	**47,756,900**	**100.00%**	**2.03%**	20.00	47,756,900				
	15	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**					**71.18**	**2,338,419,372**	**0**	**45,566,900**	**0**	**31,931,163**	**-**	**140,062,000**	**-**	**-**	**1**	**1,507,212,273**	**0.70%**	**64.45%**	0.50	1,507,212,273				
		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Kelompok yang terbentuk					6	17,466,900	6	15,966,900	-	1,100,000	0	0.00	-	-	6	17,066,900	100.00%	97.71%	6.00	17,066,900				
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejateraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga / UPPKS)	Jumlah Sarana Kelompokyang tersedia					26	447,200,000	-	-	-	1,840,000	26	0.00		445,187,800	26	447,027,800	100.00%	99.96%	26.00	447,027,800				

		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok BKB, BKL,BKR, PIK Remaja, UPPKS yang ikut orientasi/pelatihan				60	172,727,420	2	25,020,000	20	18,582,000	31	81,479,500.00	7	46,024,600	60	171,106,100	100.00%	99.06%	60.00	171,106,100					

No	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d		SKPD Penanggungjawab	ket
										I		II		III		IV													
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
		Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraankeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga / UPPKS)	Jumlah Biaya Operasional yang tersedia					4	1,585,380,000	1	-	1	-	1	40,955,000.00	1	717,795,710	4	758,750,710	100.00%	47.86%	4.00	758,750,710				
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan KesejahteraanKeluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta promosi sosialisasi (orang)					45	105,956,372	2	4,580,000	3	8,214,163	38	10,365,000.00	2	80,644,100	45	103,803,263	100.00%	97.97%	45.00	103,803,263				
		Advokasi dan Promosi IPK	Jumlah peserta Advokasi dan promosi (orang)					80	9,688,680	-	-	80	2,195,000		7,262,500.00		-	80	9,457,500	100.00%	97.61%	80.00	9,457,500				

	16	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota dalam pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Persen)**					**75.01**	**14,287,210**	**-**	**2,190,000**	**-**	**6,087,000**	**-**		**-**		**-**	**2,190,000**	**0.00%**	**15.33%**	0.00	2,190,000				
		Promosi dan Sosilisasi program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga bagimitra Kerja	Jumlah peserta promosi dan sosialisasi (orang)					80	14,287,210	-	2,190,000	80	6,087,000		4,984,500.00	-	-	80	13,261,500	100.00%	92.82%	80.00	13,261,500				
									2,352,706,582	**Rata-Rata Capaian Kinerja (%)**										**100.00%**	**64.63%**						
										Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Rendah						
									10,047,516,878	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**										**99.93%**	**90.42%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2022. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan di masa-masa mendatang

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur yang diamanatkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Luwu Timur telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur merupakan gambaran kinerja dinas tahun 2022, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama tahun 2022. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Untuk meningkatkan capaian kinerja guna mencapai Visi 2021 – 2026 , Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Timur menetapkan beberapa strategi, antara lain menyempurnakan pendefinisian indikator sasaran strategis dalam RPJMD dengan indikator-indikator yang terukur, penyempurnaan implementasi anggaran berbasis kinerja, dan menyempurnakan sistem informasi pengumpulan data kinerja.

KESIMPULAN

1. Belum optimalnya pemanfaatan data & informasi sebagai bahan perencanaan, monitoring dan evaluasi program;
2. Pencatatan dan Pelaporan Rutin sebagai bahan monitoring dan evaluasi program tidak berjalan dengan baik
3. Orientasi tenaga pelaksana Program baru pada tahap pencapaian out put belum pada out come
4. Advokasi dan KIE Program dilapangan belum berjalan secara optimal;
5. Kompetensi, Motivasi, dan Kinerja PKB/PLKB belum optimal
6. Pembangunan Keluarga melalui peran Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK R) belum berjalan secara optimal

7. Perluasan akses dan kualitas pelayanan

8. Belum optimalnya pemanfaatan data & informasi sebagai bahan Advokasi dan KIE serta pemilihan media atau saluran;

REKOMENDASI

- Program atau kegiatan seharusnya disusun dengan matang didasari data dan informasi yang akurat dengan mempertimbangkan skala perioritas.
- Pelaksanaan Program Bangga Kencana memerlukan perubahan pendekatan kepada masyarakat terutama generasi millennial
- Peningkatan kualitas SDM pengelola program melalui pelatihan, refreshing, atau studi banding.
- Perlunya inovasi dalam materi KIE, metode penyampaian, bentuk kegiatan KIE dengan memanfaatkan fasilitas dan infrastruktur IT agar tetap mengikuti perkembangan zaman.
- Memperluas jejaring kerjasama dengan mitra kerja potensial baik formal maupun informal yang merupakan penguatan dalam peningkatan komitmen stakeholder dalam program Bangga Kencana
- Setiap kegiatan yang strategis seharusnya dibuatkan Standar operasional prosedur (SOP).
- Setiap program dan kegiatan seharusnya dilakukan evalusi dan monitoring setelah pelaksanaannya. Hal tersebut bertujuan untuk menilai apakah kegiatan tersebut dapat memberikan outcome terhadap indikator kinerja utama yang ingin dicapai. Serta hasil monitoring dan evaluasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang memuaskan saat pelaksanaan kegiatan/program tersebut

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Luwu Timur Tahun 2022 ini disusun untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukkannya